



DIDUGA ADA JEJAK KORUPSI DI GRHA WISMILAK SURABAYA

Polisi Resmi Sita Gedung, Manajemen Ngaku Tak Ada Masalah Hukum

Gedung Wismilak Surabaya di Jalan Raya Darmo yang termasuk Benda Cagar Budaya (BCB) tipe A resmi disita Polda Jatim. Penyitaan dilakukan usai Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim tuntas menggeledah, papan penyitaan langsung dipasang di lokasi. Tidak hanya memasang police line, polisi juga memasang papan bertuliskan 'Telah Disita' yang dicetak tebal berwarna merah. Papan itu dipasang di samping kanan dan kiri gedung. Selain itu, papan yang sama juga dipasang di dekat area parkir. Setelah papan penyitaan dipasang, 4 polisi bersenjata lengkap langsung menjaga ketat halaman Gedung Wismilak Surabaya. Diduga ada jejak kasus dugaan pemalsuan akta, dugaan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), hingga pelaksanaan okupasi gedung yang dinilai cacat hukum. Meski kasus masih belum terang-benderang, tapi sejumlah pihak termasuk pejabat dikatakan diperiksa terkait kasus yang melibatkan Grha Wismilak Surabaya itu.

(Baca Hal 11)

PERNYATAAN RESMI MANAJEMEN

PT WISMILAK INTI MAKMUR TBK :

- Gedung GRHA Wismilak yang berlokasi di Jalan Raya Darmo 36-38, Surabaya, telah dibeli oleh PT Gelora Djaja pada tahun 1993 secara sah dengan status Hak Guna Bangunan sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- Gedung GRAHA Wismilak telah digunakan sebagai kantor operasional perusahaan sejak tahun 1993 hingga saat ini, dan selama periode waktu tersebut tidak ada permasalahan hukum yang terjadi.
- Saat ini seluruh kegiatan operasional PT Wismilak Inti Makmur Tbk dan anak perusahaan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- Seluruh permasalahan menyangkut pemeriksaan Gedung GRHA Wismilak saat ini tengah ditangani oleh Tim Kuasa Hukum PT Wismilak Inti Makmur TBK.

**Government (Hal.2)
Semester
Pertama 2023 :
KPK Sebut Kembalikan
Rp 166,3 M
ke Negara**

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM GEDUNG WISMILAK

- Gedung Grha Wismilak di Jalan Raya Darmo 36-38, Surabaya, resmi disegel dan disita oleh penyidik Polda Jawa Timur, Senin (14/8/2023) sore.
- Penyitaan itu berdasarkan surat penetapan izin khusus penyitaan Nomor: 62/PenPid. Sus-TPK-SITA/2023/PN Sby.
- Dugaan kasus yaitu ada pemalsuan akta otentik penguasaan tanah dan bangunan yang dulunya Eks [Kantor] Polisi Istimewa menjadi gedung Wismilak, korupsi dan Pencucian uang (TPPU). Tulisan Diplakat yang dipasang: "Berdasarkan Surat Penetapan Ijin Khusus Penyitaan Nomor 62/PenPid. Sus-TPK-SITA/2023/PN Sby, Tanah dan Bangunan, 1) SHGB Nomor 648. 2) SHGB Nomor 649, telah disita dalam perkara dugaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 subsidier Pasal 264 lebih subsidier Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) huruf a, b dan d Jo Ayat (2) UU RI No 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 dan Pasal 32 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan alau Pas 13 Pasal 4 dan Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana."
- Pengeledahan dilakukan di Perusahaan Gelora Jaya, Bumi Inti Makmur dan PT Wismilak Inti Makmur.

DILARANG MELINTAS GARIS POLISI POLICE LINE DO NOT CROSS

T CROSS

POLICE LINE

DO NOT CROSS

POLICE LINE

DO NOT CROSS

POLICE LINE

PO LI

Semester Pertama 2023

KPK Sebut Kembalikan Rp 166,3 M ke Negara



Konferensi pers kinerja KPK semester 1 tahun 2023 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/8/2023). (ist)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan hasil kerja selama semester pertama pada 2023. Tim lembaga antirasuah ini menyebut berhasil mengembalikan ratusan miliar kepada negara.

"Asset recovery pada semester pertama berjumlah Rp 166,36 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Alex mengatakan ratusan miliar asset recovery itu terdiri atas Rp 32,75 juta uang pengganti. Selain itu, tim KPK berhasil menyita hasil rampasan tindak pidana korupsi sebesar Rp 124,22 miliar dan denda sebesar Rp 9,39 miliar.

Capaian tersebut dihitung dari awal tahun hingga 30 Juni 2023. Selama rentang waktu tersebut, ada 73 kasus dalam proses penyelidikan dan 85 kasus yang sudah naik ke tahap penyidikan. "KPK menetapkan adanya 89 tersangka," ujar Alex.

Dalam semester pertama pada 2023, ada tiga operasi tangkap tangkap (OTT) yang dijalankan KPK. Alex mengatakan ketiga OTT itu berkaitan dengan kasus suap pengadaan barang dan jasa. Dia menambahkan, sektor tersebut menjadi titik yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Dari kegiatan tangkap tangan ini semuanya menyangkut suap pengadaan barang dan jasa. Ini titik yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi atau persekongkolan ini menyangkut barang dan jasa.

Sangat terbuka antara penyelenggara negara dan vendor untuk melakukan persekongkolan yang berujung tindak pidana suap," pungkas Alex.

PPATK Diminta Usut Aliran Uang ke DRP

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyoroti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke parpol untuk pemilu 2024. Sahroni pun meminta PPATK segera menempuh langkah lanjutan dari hasil analisis tersebut.

"Kejahatan lingkungan itu kejahatan luar biasa, karena efeknya yang luar biasa pada kemanusiaan. Karenanya saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (14/8/2023).

"Saya tidak mau duit haram dari kerusakan lingkungan mengalir ke proses demokrasi kita," lanjutnya.

Bendahara Umum NasDem itu mengingatkan, menjelang pemilu memang aliran dana yang berasal dari sumber-sumber haram akan banyak muncul. Karenanya, beliau meminta PPATK meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum demi meningkatkan pengawasan.

"PPATK sudah baik bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu dalam hal ini. Namun perlu juga ditingkatkan koordinasi dengan penegak hukum

dari KPK, polisi hingga kejaksaan agar aliran dana haram ini tidak hanya ditelusuri, tapi juga dicegah penyalurannya," tutup Sahroni.

Terkait hal itu, Menko Polhukam Mahfud MD telah mengetahui hasil temuan PPATK itu. Ia pun menyerahkan sepenuhnya proses kepada PPATK. "Yang memeriksa, kan, bukan kami," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Namun, Mahfud memastikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan PPATK terkait hal itu.

"Ya, pasti lah," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yusiavandana mengatakan pihaknya bersama KPU dan Bawaslu menemukan ada dana sebesar Rp 1 triliun yang masuk ke partai politik. "Dari PPATK fokusnya adalah kalau bicara kontestasi politik menggunakan uang sudah pasti pertanyaannya adalah sumbernya dari mana, sifat uangnya itu apa, sumbernya internal atau eksternal, sifatnya itu legal atau ilegal," kata Ivan dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu dengan tajuk 'Wujudkan Pemilu Bersih' yang digelar Selasa (8/8/2023).

Ivan mengatakan, pihaknya menemukan uang sebesar Rp 1 triliun yang merupakan uang kejahatan yang masuk ke partai politik. "Belum lama ini kita ramai dengan ini, ini pada saat kami melakukan diskusi dengan KPU dan Bawaslu. Jadi seluruh industri berkumpul di Hotel Sultan lalu salah satu temuan PPATK yang sudah ditemukan beberapa waktu yang lalu

ada Rp 1 triliun uang kejahatan yang masuk ke partai politik," ungkapnya.

Dana tersebut berasal dari kegiatan kejahatan lingkungan (Green Financial Crimes) yang diduga digunakan untuk persiapan pemilu 2024. (wid,rls,ant/dya)

OTT KPK DI SEMESTER 1 2023:



1. Bupati Kepulauan Meranti, **Muhammad Adil;**



2. **Harno Trimadi** selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian, DJKA Kemenhub, dkk dalam kasus pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub tahun 2018-2022; dan



3. Wali Kota Bandung **Yana Mulyana.**

TOTAL TINDAKAN SELAMA 6 BULAN TERSEBUT:

Penyelidikan	73
Penyidikan	85
Penuntutan	52
Perkara Yang Inkrah	63
Eksekusi Perkara	100
Tersangka	89

6 KASUS TPPU



1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Riau **M Syahrir;**



2. Hakim Agung **Gazalba Saleh;**



3. Gubernur Papua nonaktif **Lukas Enembe;**



4. **Rijatono Lakka** selaku Direktur PT Tabi Bangun Papua (penyuap Lukas Enembe);



5. **Rafael Alun Trisambodo** selaku eks pejabat Ditjen Pajak; dan



6. **Andhi Pramono** selaku eks Kepala Bea Cukai Makassar.

3 DPO



1. Kirana Kotama;



2. Harun Masiku;



3. Paulus Tannos.

Serangan Wabah Penyakit Hewan Meningkatkan RUU PKH Didesak Disahkan

YOGYAKARTA – Wabah penyakit pada hewan terus meningkat. Terbaru, Malaysia memutuskan untuk menghentikan sementara impor sapi hidup dari Australia karena alasan penyakit kulit menggumpal (LSD). Kebijakan ini menyusul keputusan serupa yang diambil Indonesia pada bulan lalu.

Tak hanya itu, sejak setahun lalu penyakit mulut dan kuku (PMK) juga mewabah di negeri ini. Kementerian Pertanian menetapkan enam kabupaten, di Jawa Timur (empat kabupaten) dan di Aceh (dua kabupaten), terjangkit wabah PMK pada 11 Mei 2022.

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Gajah Mada (UGM) pun mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Hewan (RUU PKH) menjadi undang-undang. Salah satunya untuk menghadapi wabah penyakit menular pada hewan yang saat ini makin marak.

Dekan FKH UGM, Teguh Budipitojo mengatakan RUU PKH tersebut sangat urgen untuk segera disahkan secepatnya. Teguh pun mendesak ke DPR RI agar pengesahan RUU PKH bisa segera dilakukan.

"Kita inginnya segera ya, kalau bisa tahun ini tentu sangat membantu sekali bagi kita terutama dalam menata pendidikan kedokteran hewan dan membantu menghadapi wabah penyakit menular pada hewan di Indonesia," kata Teguh dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (14/8/2023).

Teguh menjelaskan, dari data selama 25 tahun terakhir ada sekitar 12 wabah penyakit menular pada hewan. Wabah tersebut tak hanya berasal dari penyakit baru, tapi ada juga penyakit lama yang muncul kembali.

Data ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan pada masa penjajahan Belanda hingga zaman orde baru. Selama sekitar 118 tahun, hanya ada sekitar 7 wabah penyakit yang muncul. "Jadi dalam waktu yang pendek akhir-akhir ini berbagai macam penyakit muncul baik yang lama maupun yang baru, sementara dalam waktu yang lama waktu itu hanya ada sedikit. Nah ini urgensi juga untuk segera disahkan RUU PKH," ungkap Teguh.

Di samping itu, lanjut Teguh, alasan lain yang menjadikan RUU PKH harus segera disahkan adalah terkait belum adanya peraturan perundangan yang menaungi pendidikan tinggi kedokteran hewan secara spesifik.

Saat ini pendidikan tinggi kedokteran hewan masih mengikuti standar nasional pendidikan tinggi sesuai Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 sebagai penjabaran Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012.



Petugas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, saat memeriksa kesehatan sapi di salah satu peternakan di Cimanggis. (ilustrasi/dok)

"Padahal di kedokteran hewan itu kan sangat spesifik, nah itu belum tercover di situ. Misalnya saja regulasi terkait dengan jumlah mahasiswa yang dapat diterima oleh suatu perguruan tinggi kedokteran hewan, itu kan menyangkut berbagai macam infrastruktur yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu sendiri. Selama ini baik perguruan tinggi yang sudah mapan maupun yang baru berkembang diperlakukan sama, tidak ada regulasi, terkait jumlah mahasiswa yang bisa dididik oleh perguruan tinggi, itu gak ada," urainya.

Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) itu menambahkan, persoalan lain yang mendesak adalah terkait akreditasi. Selama ini akreditasi masih menginduk pada Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPTKes).

"Ujung pendidikan itu kan menghasilkan dokter hewan yang berkualitas. Untuk menghasilkan yang berkualitas itu lah maka standar khusus pendidikan kedokteran hewan itu harus ada, nah itu belum ada sampai saat ini, sehingga perlu ada

satu badan yang menaungi, ada satu undang-undang yang mengatur hal ini," terangnya.

Di sisi lain, Indonesia juga belum memiliki apa yang disebut Veterinary Statutory Body (VSB) atau konsil kedokteran hewan Indonesia. Lembaga ini adalah lembaga independen yang mengatur, baik lembaga pendidikan tinggi itu sendiri maupun lulusannya.

Sebab menurutnya, setelah perguruan tinggi menghasilkan dokter hewan maka profesinya itu juga perlu diatur. Apalagi lembaga sejenis ini menjadi tuntutan organisasi kesehatan hewan dunia, bahwa di suatu negara itu harus memiliki VSB. "Hampir semua negara ASEAN itu sudah punya, iya ASEAN saja lah gak usah jauh-jauh. Nah kita Indonesia belum punya padahal katanya kita menjadi leading sector di ASEAN. Memang agak ironi," tegasnya.

Akibatnya, lanjut dia, pendidikan tinggi kedokteran hewan Indonesia tidak dilibatkan dalam pembahasan penyusunan akreditasi khusus pendidikan tinggi kedokteran hewan di tingkat regional Asia Tenggara

sekalipun. "Oleh karena itu UU PKH ini juga diharapkan menjadi salah satu regulasi yang nantinya memberi kewenangan untuk membuat VSB itu," ucapnya.

DPR Sebut Proses Masih Panjang

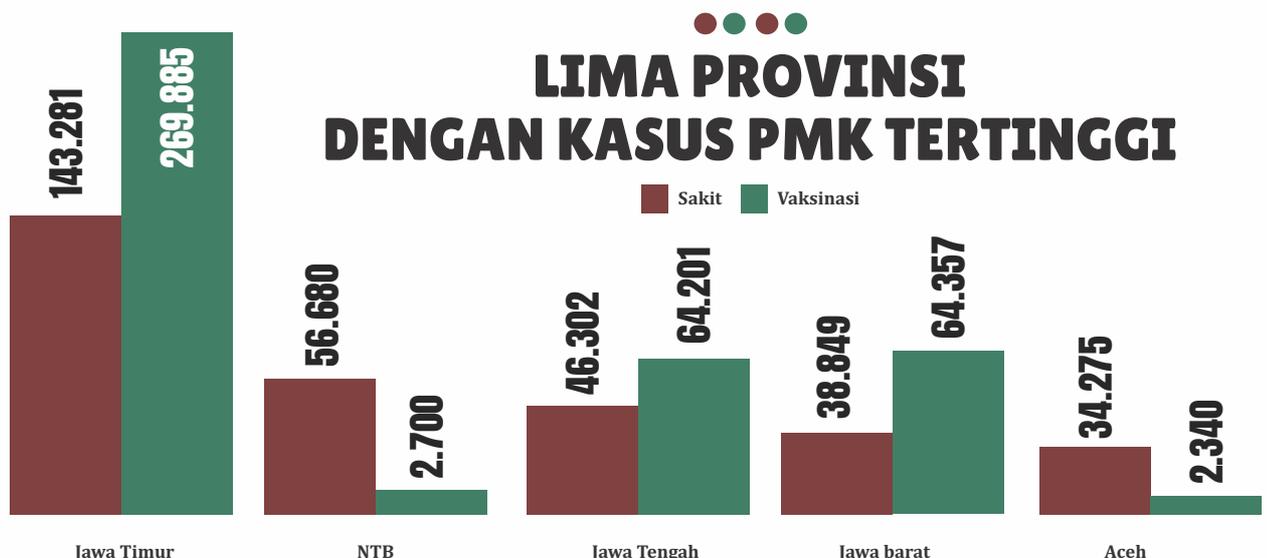
Sementara itu, PLT Kepala Pusat PUU Bidang Ekuinbagkesra DPR RI Wiwin Sri Rahyani menyebut saat ini prosesnya masih dalam tahap penyiapan penyusunan RUU di Badan Keahlian DPR.

"Prosesnya masih panjang karena sekarang di internal tim Badan Keahlian DPR dielaborasi menjangir masukan-masukan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam konteks meaningful participations," ujarnya.

Nantinya setelah proses di internal Badan Keahlian DPR, kata Wiwin, baru dilaporkan ke alat kelengkapan DPR yang terkait, yakni di Komisi X. Setelah itu baru dilakukan tahapan pengharmonisan di Badan Legislasi DPR. "Kemudian baru nanti ditetapkan menjadi RUU usul dari DPR dan selanjutnya disampaikan ke presiden untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Jadi memang prosesnya masih lumayan banyak yang harus dilalui," bebernya.

Ditanya terkait target, Wiwin belum bisa memastikan kapan RUU PKH ini akan rampung dan disahkan menjadi UU. Sebab hal itu juga bergantung pada fleksibilitas dan dinamika politik yang sangat dominan. "Untuk target misalnya Pemilu itu Februari 2024 dan berakhir di 1 Oktober 2024 dengan keanggotaan periode baru, harapan kami sebagai supporting system bahwa RUU ini bisa selesai minimal di akhir masa jabatan anggota DPR periode ini. Mudah-mudahan di tahun depan dengan segala arah kebijakan politik dari DPR ini menjadi salah satu hal yang diprioritaskan untuk diselesaikan," pungkasnya. (wid,viv,rls,ist/dya)

LIMA PROVINSI DENGAN KASUS PMK TERTINGGI



Wabup Blitar Serahkan Surat Pengunduran Diri ke DPRD



Wabup Blitar, Rahmat Santoso (kiri) menyerahkan surat pengunduran dirinya pada DPRD Kab Blitar

BLITAR - Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso membuktikan ucapannya mundur dari jabatannya, dengan menyerahkan surat pengunduran dirinya ke Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Senin (14/8/2023).

Wabup Blitar, Rahmat Santoso hadir ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar di Sawentar, Kecamatan Kanigoro sekitar jam 14.30 WIB. Setelah disampaikan tujuannya bertemu pimpinan DPRD Kabupaten untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya, ternyata seluruh pimpinan sedang tidak ada di tempat.

Akhirnya orang nomor dua di

Kabupaten Blitar tersebut ditemui oleh Kebag Persidangan dan Perundangan-undangan Sekwan DPRD Kabupaten Blitar, Nadek dan menerima surat yang ditujukan kepada pimpinan DPRD tersebut.

Nadek menyatakan akan melihat dan memeriksa surat yang diberikan oleh Wabup Rahmat tersebut, bila sudah benar surat pengunduran diri maka akan diproses dan dilakukan sidang paripurna untuk menindaklanjuti.

"Butuh waktu sekitar 3 hari untuk melihat dan memeriksa surat ini, bila sudah benar akan diparipurnakan," katanya.

Usai menyerahkan surat pengunduran dirinya, ketika ditanya wartawan alasannya. Wabup Rahmat mengaku sengaja mundur karena kecewa dan malu. "Siapa yang tidak malu, setelah susah payah mencari bantuan ke pusat. Setelah diberikan tidak segera diserap dan dilaksanakan, sampai saya ditegur oleh pihak yang memberi bantuan," tandas pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.

Bahkan karena rasa kecewa dan malu ini, Wabup Rahmat menegaskan juga menunda pengajuan bantuan untuk tahun 2023 ini. "Karena bantuan sebelumnya sebesar Rp 12,6 miliar untuk pembangunan jembatan belum terlaksana, karena adanya dugaan permainan lelang dan pungli berupa fee proyek Rp 300 juta. Maka pengajuan bantuan untuk tahun ini saya pending," beber politisi dari Partai PAN ini.

Apakah pengunduran dirinya ini juga terkait dengan akan maju menjadi Caleg DPR RI Dapil Jatim IX Kabupaten Bojonegoro-Tuban. Wakil Ketua DPW PAN Jatim ini mengatakan sengaja mundur lebih awal, meskipun sesuai aturan mundur sejak ditetapkan masuk dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) pada November 2023 mendatang. "Karena saya sudah terlanjur kecewa dan malu, makanya saya mundur lebih awal," terangnya.

Disinggung kabar kalau dirinya akan maju menjadi AG 1 atau calon Bupati Blitar pada Pilkada 2024 mendatang, pria yang akrab disapa Makdhe Rahmat ini menjawab kalau jabatan itu takdir yang sudah digariskan Allah SWT dan tidak dibawa mati. "Kalau memang masyarakat menghendaki dan diberikan amanah, kenapa tidak? Kalau pun saya sekarang mundur lebih awal, saya akan tetap menjadi macan meskipun berada di kandang wedus," imbuhnya sambil masuk ke dalam mobil dinas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wabup Blitar Rahmat Santoso menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya. Karena kecewa dengan ulah oknum pejabat Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Pemkab Blitar, karena diduga melakukan pungli meminta fee proyek sebesar Rp 300 juta pada proyek 2 jembatan yakni Jembatan Dawuhan di Kecamatan Kademangan dan Jembatan Tunjung di Kecamatan Udanawu. Senilai Rp 12,6 miliar, yang bersumber dari dana APBN melalui BNPB.

Akibat dugaan dimainkannya proyek tersebut molor dan belum dikerjakan hingga saat ini, padahal dana bantuan sudah ditransfer masuk ke APBD pada Pebruari 2023 lalu. (ais/lut)

Indonesia Kecam Pembakaran Al Quran di Depan KBRI Kopenhagen

JAKARTA - Indonesia mengecam keras pembakaran Al Quran di depan KBRI Kopenhagen oleh kelompok sayap kanan Denmark, Danske Patriotet.

Tidak hanya di depan KBRI, anggota kelompok tersebut juga melancarkan aksi provokatif mereka di depan kedutaan besar negara mayoritas Muslim lainnya yaitu Pakistan, Aljazair, Maroko, serta di sebuah masjid pada 12 Agustus lalu.

"Kita mengecam dengan sangat keras aksi pembakaran kitab suci Al Quran," kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ketika ditemui di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Retno menjelaskan bahwa setiap kali terjadi pembakaran Al Quran, Pemerintah Indonesia selalu merespons dengan mengirim nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Denmark serta memanggil duta besar atau kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Denmark di Jakarta untuk menyampaikan protes.

Selain itu, Retno juga telah

menerima panggilan telepon dari Menlu Denmark Lars Lokke Rasmussen dan menyampaikan posisi tegas Indonesia terhadap masalah ini.

"Saya sampaikan (kepada Menlu Denmark): jangan berlindung di balik freedom of expression. Tindakan ini melukai umat Islam di seluruh dunia dan tidak seharusnya dilakukan," tutur Retno.

Lebih lanjut dia memperingatkan bahwa aksi provokasi semacam itu bisa menyebarkan kebencian dan sangat berbeda dengan keinginan Indonesia untuk terus memelihara dialog antaragama.

Sementara itu, Indonesia juga terus menyuarakan agar negara-negara membuat aturan tegas untuk melarang penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan apa pun di dunia.

"Ini yang diminta oleh OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dan ada resolusi Dewan HAM PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang kita terus dorong, supaya semua

negara membuat aturan yang melarang orang menghina simbol-simbol agama," ujar Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemlu Umar Hadi.

Dia pun berharap insiden pembakaran atau penghinaan al Quran tidak mengundang reaksi yang berlebihan, sehingga tidak memicu tindak kekerasan lainnya.

Tahun ini, aksi pembakaran Al Quran marak terjadi di beberapa negara Eropa. Pemerintah Swedia, Denmark-tempat di mana insiden terjadi akhir-akhir ini-selalu berdalih aktivitas tersebut berada di bawah pengawasan polisi sehingga bukan tanggung jawab langsung pemerintah.



Menlu Retno Marsudi menjawab pernyataan wartawan di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (14/8/2023) -Ant

Di negara-negara itu, aksi semacam itu seringkali dianggap sebagai hak kebebasan berekspresi. Komunitas dan organisasi internasional mendesak agar kedua negara mengambil sikap tegas terhadap pelaku sehingga insiden serupa tak terjadi. (ant/lut)

Saat Gibran Digadang-gadang Jadi Cawapres Prabowo



Salah satu foto yang diunggah Wali Kota Solo Gibran saat bersama Menhan Prabowo di media sosialnya menuai berbagai komentar dari netizen hingga polisi. (ist)

JAKARTA-Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belakangan santer disebut bakal maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2024. Bahkan, dalam survei terbaru LSI Denny JA pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih elektabilitas tertinggi.

Terkait hal itu, Gibran mengatakan belum pas untuk maju di Pilpres 2024. Selain pengalaman, syarat usia juga belum masuk dalam syarat menjadi capres dan cawapres. "Umurnya enggak cukup, aturannya enggak bisa umur enggak cukup," kata Gibran di Semarang, Jawa Tengah, Senin (14/8/2023).

Syarat usia yang dimaksud Gibran saat ini memang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi oleh 3 kelompok masyarakat. Dalam gugatannya, mereka meminta syarat usia diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Selain itu, ada petitem yang menyebutkan, bila usia tidak diturunkan ada syarat lain yang bisa dipakai, yakni pernah menjadi penyelenggara pemerintahan, termasuk kepala daerah. Bila kedua gugatan ini dikabulkan, maka Gibran bisa saja maju di Pilpres 2024.

Gibran menegaskan, saat ini masih sebagai anggota PDIP dan bekerja untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, hampir setiap minggu ada acara bersama dengan Ganjar.

"Sudah tiap minggu kita bikin acara terus," ucap dia.

Senada, Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Oly Dondokambey menanggapi santai soal isu tersebut. Menurut Oly, pihaknya tak mau ambil pusing isu tersebut dan bakal berfokus memenangkan capres dari PDIP,

Ganjar Pranowo.

"Kami konsentrasi pemengangan Ganjar, kami tidak lirik kubu-kubu mana. Jadi kami konsentrasi untuk kemenangan Ganjar," kata Oly di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Soal proses pemilihan cawapres Ganjar Pranowo, Oly menyebut nama-namanya sudah ada di Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Ia menyebut partainya tengah menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan cawapres tersebut.

"Yang jelas sudah kami sampaikan ke Bu Mega, Bu Mega tinggal melihat mana yang paling pas untuk mendampingi Ganjar dalam membangun Indonesia ke depan lebih hebat," kata Oly.

Saat ditanya apakah cawapres Ganjar bakal berlatar belakang agamis dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Oly menyebut kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Apalagi, selama ini pola kerja sama PDIP dalam setiap Pilpres selalu berhubungan dengan kelompok tersebut.

Unggul dalam Survei

Dari simulasi tiga poros capres-cawapres LSI Denny JA, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih elektabilitas tertinggi. "Dilihat dari segmen pendidikan, publik dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA paling banyak memilih Prabowo-Gibran," kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, Senin (14/8/2023).

"Untuk tingkat SD, misalnya, pemilih Prabowo-Gibran 42,7 persen. Sedangkan yang memilih Ganjar-Sandi 31,9 persen, Anies-AHY 14,0 persen," tuturnya.

Dari hasil simulasi yang

disampaikan, elektabilitas Prabowo-Gibran di angka 38,8 persen. Sementara Ganjar Pranowo yang dipasangkan Sandi membuntuti di angka 33,1 persen. Di posisi ketiga ada duet Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di angka 16,4 persen.

Survei yang dilakukan kepada pemilih berdasarkan agama Islam juga menunjukkan pasangan Prabowo dan Gibran dan Ganjar maupun Anies. "Sebaliknya, di kalangan pemilih non-Islam unggul Ganjar-Sandi: 50,0 persen. Prabowo-Gibran 31,1 persen. Anies-AHY: 17,7 persen," lanjutnya.

Melihat hasil survei tersebut, Ardian mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran justru lemah di kalangan pemilih minoritas. "Kalangan minoritas menjadi titik lemah Prabowo-Gibran. Di segmen ini, mereka kalah telak dari Ganjar-Sandi dengan selisih 18,9 persen.

Pasangan Prabowo-Gibran juga berhasil mendapatkan elektabilitas paling tinggi di wilayah Jawa Tengah, Banten, Kalimantan, Bali-NTB-NTT,

Maluku-Papua. Survei LSI Denny JA dilakukan pada 3-15 Juli 2023 dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak. Survei menggunakan metode interview tatap muka dengan menggunakan kuesioner. (wid,rls, ist/dya)

SIMULASI CAWAPRES (PRABOWO - GIBRAN)



Dr. MUHAMMAD ISA ANSHORI, ATD, MT
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

MA KH. ABDURRAHMAN

n Penguatan Sumber Daya

is, 31 Maret 2



GUS KAUTSAR

Jadi Perbincangan di Dunia Maya

ULAMA muda dari Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, K.H. Muhammad Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar), mengatakan, galau dalam Islam itu tidak ada.

"Galau itu dilarang dalam Islam dengan dua solusi, yakni sabar dan syukur. Apa yang disebut galau itu justru solusi, karena bisa mendekatkan kita kepada mencari Allah," katanya di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya (MAS).

Dalam pengajian Majelis Subuh Gen-ZI bertema "Merdeka dari Galau" di MAS bersama pendakwah ustadzah Haneen Akira (istri ustadz Hanan Attaki) itu, Gus Kautsar menilai galau merupakan solusi bahwa semua yang ada dan terjadi merupakan garis tangan atas izin Tuhan.

"Jadi, kalau Islam secara beneran itu, galau itu nggak ada, karena semuanya atas kehendak Allah dengan tujuan yang indah, misalnya ketangguhan, memaklumi setiap kejadian, memaafkan siapapun, jadi kalau semuanya dikembalikan kepada Allah akan membuka semua pintu solusi. Semuanya indah, kalau gagal nggak benci, nggak menyalahkan, nggak mencari kambing hitam, tapi muhasabah," katanya.

Di hadapan ribuan jamaah dari kalangan generasi Z Islami dari Surabaya dan sekitarnya itu, putra KH Nurul Huda Djazuli itu mengutip pandangan bijak dari Imam Syafi'i. "Kalau ingin baik ya ikuti orang-orang dulu, seperti Imam Syafi'i. Kalau ikut orang-orang masa kini justru bisa nggak baik," katanya.

Menurut Imam Syafi'i, kata Gus Kautsar, apapun masalah yang menimpa itu dibiarkan saja berlalu dengan membawa masalahnya, jangan terlalu meratapi masalah yang datang, karena semua masalah itu pasti ada akhir/ending dan semua masalah itu

mengajari untuk rela dan sabar.

"Imam Syafi'i juga mengajarkan muhasabah kalau menghadapi masalah. Masalah itu merupakan bagian atau jatah dari kehidupan. Kalau sudah jatah untuk kita, dihindari juga nggak mungkin. Kalau bukan jatah kita, dicari juga nggak datang. Yang penting, tetaplah menjadi orang baik, karena masalah itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Kalau menggugat Allah justru panjang hisabnya," katanya.

Tidak jauh berbeda, pendakwah ustadzah Haneen Akira menyatakan kehidupan itu bukan hanya meraih, mencari, mengingat, atau memiliki, tapi kehidupan juga memberi pelajaran untuk melepas.

"Kita harus belajar melepaskan, karena kalau kelamaan galau justru membuat kita kehilangan energi, kesehatan, dan waktu yang berharga. Islam mengajarkan tawakkal," kata istri dari pendakwah ustadz Hanan Attaki itu.

Menurut alumni Universitas Al Azhar Mesir itu, tawakkal itu mengajarkan untuk memahami bahwa hasil akhir itu tidak pernah ada di tangan manusia.

"Bukan soal baik atau tidak baik dari apa yang terjadi, tapi hasil akhir ada di tangan Allah. Jangan terlalu fokus ke dunia, fokus ke ridha Allah. Kalau fokus ke Allah, maka Allah yang menguatkan dan mencukupkan. Kalau fokus ke dunia akan cepat galau, capek," katanya.

Ia menambahkan ketidakpastian adalah sinyal kehidupan. "Buktinya, ada musim panas, ada musim dingin. Ada malam, ada siang. Ada duka, ada gembira. Ada indah, ada jelek. Dan, obat ketidakpastian adalah iman, karena iman membuat kita selamat bila galau, kecewa," katanya. (istimewa)

"Galau itu dilarang dalam Islam dengan dua solusi, yakni sabar dan syukur. Apa yang disebut galau itu justru solusi, karena bisa mendekatkan kita kepada mencari Allah,"



PROFIL

NAMA LENGKAP:

Muhammad Abdurrahman Al Kautsar

TEMPAT LAHIR:

Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur

KEBANGSAAN:

Indonesia

PENDIDIKAN:

Lasem

PEKERJAAN:

Kyai Muda, Kepala Sub Pondok di Pesantren Al Falah

NAMA AYAH:

KH. Nurul Huda Djazuli

NAMA KAKEK:

KH. Ahmad Djazuli Utsman

NAMA NENEK:

Ny.Hj. Rodliyah

NAMA ISTRI:

Ning Jazil binti KH. Abdul Haamid Baidhowi

NAMA ANAK:

Chasna Naylufer dan Gus Nayef Sambudigdo

HIPERTERMIA, PENYAKIT AKIBAT SUHU PANAS MENGGILA

SUHU panas melanda hampir semua negara di dunia akibat pemanasan global.

Bahkan, heatwave di beberapa negara sudah memakan korban.

Tubuh Manusia, memang pada umumnya memiliki batasan menahan rasa panas dan dingin.

Beberapa kasus penyakit bahkan bisa mengakibatkan meninggal dunia karena suhu panas tubuh yang tidak bisa dikendalikan. Salah satunya hipertermia.

Hipertermia adalah kenaikan suhu tubuh yang tidak normal akibat kegagalan mekanisme tubuh dalam mengatur panas tubuh ketika suhu lingkungan di luar tubuh meningkat.

Dikutip dari laman resmi Primaya Hospital, kelelahan akibat panas (heat fatigue, heat exhaustion), heat cramps (nyeri dan kejang akibat panas), heat syncope dan heat stroke, yaitu pingsan akibat panas adalah bentuk-bentuk umum dari hipertermia.

Berkeringat merupakan mekanisme alami untuk mendinginkan tubuh yang terpapar oleh panas dari lingkungan di luar tubuh, tetapi kadang sendiri tidak cukup untuk mengembalikan suhu tubuh pada kondisi normal.

TIPE-TIPE HIPERTERMIA

1. Heat Cramps

Kejang pada otot dapat terjadi apabila seseorang kehilangan terlalu banyak elektrolit yang ada pada cairan tubuh lewat produksi keringat. Elektrolit yang umum contohnya adalah kalsium, klorida, magnesium, fosfor, kalium, sodium. Kejang ini biasa terjadi di lengan, tangan, tungkai bagian bawah, dan kaki.

2. Heat Edema

Hipertermia jenis ini ditunjukkan dengan adanya pembengkakan di area pergelangan kaki dan kaki di tengah cuaca panas. Panas dapat mengakibatkan pembuluh darah membesar sehingga cairan pada tubuh mengalir ke arah tangan dan kaki. Hal ini yang membuat terjadinya pembengkakan pada area tersebut ketika tubuh terpapar panas.

3. Heat Syncope

Pada tipe hipertermia ini, seseorang akan mengalami pingsan secara mendadak atau rasa pusing yang biasanya terjadi terlalu lama atau melakukan gerakan berdiri secara mendadak setelah duduk atau berbaring. Faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada kondisi

ini adalah dehidrasi dan kurangnya kemampuan tubuh untuk beradaptasi pada perubahan cuaca.

4. Heat Exhaustion

Heat exhaustion atau kelelahan yang terjadi akibat panas mempunyai gejala lebih serius daripada heat cramps. Suhu tubuh Anda bisa mencapai 40 derajat celsius dan kondisi ini dapat berakibat pada heat stroke.

5. Heat Rash

Apabila terjadi keringat berlebihan di tubuh pada cuaca yang panas dan lembab, kulit dapat mengalami iritasi. Iritasi ini disebut dengan heat rash. Heat rash biasanya berkembang di lipatan siku, di bawah payudara, dekat lipatan pangkal paha atau di dada bagian atas dan leher.

6. Heat Stress

Heat stres biasanya terjadi pada pekerja yang terpapar oleh panas yang ekstrim atau mereka yang bekerja di tengah lingkungan yang panas. Pekerja yang lebih beresiko pada kondisi ini adalah pekerja berusia 65 tahun ke atas, pekerja dengan berat badan berlebih, pekerja dengan penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, atau mereka yang tengah mengonsumsi obat-obatan yang dapat terpengaruh

oleh panas ekstrim.

7. Heat Stroke

Tipe yang paling parah dari hipertermia adalah heat stroke. Kondisi ini dapat berakibat fatal, bahkan menyebabkan kematian karena efeknya pada otak dan organ-organ lain. Heat stroke dapat mengikatnya suhu tubuh naik hingga lebih dari 40 derajat celsius, bahkan hingga 41 derajat celsius. Gejala dari heat stroke lain adalah kondisi mental yang berubah, seperti kebingungan, rasa tersinggung, dst, seperti mual-muntah, kulit ke-merahan, napas bertambah cepat, dan sakit kepala.

TANDA-TANDA HIPERTERMIA

1. Gejala Heat Cramps

Pada hipertermia jenis ini, terdapat tanda-tanda berupa kejang otot di perut, lengan, atau tungkai kaki setelah Anda melakukan aktivitas berat. Kulit Anda akan terasa lembab dan dingin serta tingkat denyut jantung bisa normal, maupun menjadi cepat.

2. Gejala Heat Edema

Bengkak atau terjadinya pengelembungan di jaringan yang terdapat langsung di bawah kulit, biasanya terjadi di bagian tungkai kaki atau lengan;

3. Gejala Heat Syncope

Tanda-tanda dari tipe hipertermia ini termasuk pingsan, yang terjadi secara tiba-tiba, disertai dengan rasa pusing, kepala terasa ringan (lightheadedness) akibat berdiri terlalu lama atau tiba-tiba berdiri dari posisi duduk atau berbaring.

4. Gejala Heat Rash

Tanda-tandanya adalah munculnya kelompok-kelompok jerawat-jerawat kecil atau bintik-bintik melepuh di kulit.

5. Gejala Heat Stress

Gejala dari heat stress ini termasuk telapak tangan yang berkeringat, kacamata safety yang beruap, dan pusing.

6. Heat Exhaustion

Pada tipe hipertermia ini, kulit akan terasa dingin dan lembab disertai dengan denyut jantung yang bertambah cepat namun lambat. Napas juga akan terasa cepat dan pendek-pendek. Heat exhaustion ini dapat berkembang menjadi heat stroke apabila tidak ditangani dengan cepat.

7. Heat Stroke

Kondisi ini adalah kondisi yang paling mengancam nyawa di mana suhu tubuh bisa mencapai angka 40 derajat Celcius. Tanda-tanda heat stroke bisa bervariasi. Namun, gejala-gejala di bawah termasuk kepada tanda terjadinya heat stroke (bisnis)



TOYOTA INVESTASI YARIS CROSS DI KARAWANG

TOYOTA Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) telah menginvestasikan sekitar Rp2,5 triliun untuk menyiapkan lini produksi model baru Toyota Yaris Cross yang dibuat di pabrik Toyota Plant 1 Karawang, Jawa Barat.

"Untuk new model atau model change itu sekitar Rp2,5 triliun, dan kami ada line baterai baru, tidak semua line fit untuk unit tersebut. Itu yang kami selalu lakukan. Tidak hanya untuk line produksi, investasi itu juga kami tempatkan di sisi supplier (pemasok)," kata Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto di Karawang.

Nandi menjelaskan bahwa total kapasitas produksi di Plant 1 dan 2 Karawang--yang juga memproduksi Innova, Fortuner, Vios, dan Sienta--adalah 257.000 per tahun. Sekarang kapasitas produksi terpakai baru 70-80 persen.

Oleh karena itu, masih ada ruang untuk menuju kapasitas penuh, meskipun untuk Yaris saat ini kapasitas produksinya di Plant 1 sudah mencapai sekitar 90 persen.

Jadi, menurut Nandi, untuk jangka pendek sampai dengan 2025, TMMIN belum akan menaikkan kapasitas produksi, yang ada memaksimalkan kapasitas produksi tersisa dan ini lebih condong ke efisiensi saja.

"Sementara untuk jangka panjang, rencana peningkatan kapasitas produksi pasti ada," katanya di sela media tour produksi Yaris Cross di Plant 1 dan 2 TMMIN di Karawang.

Nandi melanjutkan bahwa investasi untuk elektrifikasi di Karawang itu merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Dalam membangun ekosistem itu, TMMIN selalu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

Dengan Pertamina, misalnya, kita

menerima para tenaga dari Pertamina untuk belajar mengenai kendaraan listrik. "Kerja sama ini selalu kita mulai dari people development ya, kalau people development sudah siap baru ke masalah produksi," katanya.

Mengenai ekspor kendaraan listrik, Nandi mengatakan, peluang besarnya justru di hybrid, kalau BEV di Eropa dan Amerika misalnya itu produksi sendiri. Jadi, peluangnya besar di kawasan lain, misal Timur Tengah, dan Asia seperti Filipina.

Lokalisasi

Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam mengatakan bahwa Toyota sudah hadir di Indonesia sejak lama dan selalu terus turut membangun ekosistem otomotif di sini.

Mengenai lokalisasi untuk komponen dan produksi kendaraan listrik, kata Bob, untuk memang sudah menjadi bagian rencana TMMIN ke

depan karena kita ketahui bahwa masalah terbesar elektrifikasi adanya di supply chain (pasokan bahan baku dan komponen) yang sekarang hanya dikuasai beberapa negara.

"Jadi kalau kita nggak lokalisasi nanti supply chain nggak secure. Kita harus lokalisasi. Tapi, untuk lokalisasi itu ada economic scale-nya, misalnya untuk kapasitas 100.000 unit kita ada komponen yang kita lokalisasi," katanya.

Toyota selalu menjalin kerja sama untuk pengembangan baterai ini, di Jepang ada dengan Panasonic, dan lain-lain. "Tapi bagaimana kita bisa meng-create market. Ini penting, dan

market kita untuk kendaraan listrik ini sudah 6 persen," jelas Bob.

"Kenapa kenaikan market kami cukup tajam, antara lain karena kita meluncurkan Innova Zenix dan Yaris Cross yang menggunakan mesin hybrid, selain juga ada model lain yang BEV," jelas Bob.

Untuk di Indonesia, kata Bob, populasi kendaraan listrik masih didominasi hybrid, dengan komposisi 60 persen, sedangkan 40 persennya adalah BEV (Battery Electric Vehicle) - (Ant)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MUSEUM PERJANJIAN LINGGARJATI DESTINASI FAVORIT

Sumber Foto : indonesiakaya.com

MUSEUM Perjanjian Linggarjati, di Kuningan menjadi saksi bisu proses berdirinya Republik Indonesia.

Museum yang terletak di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan ini sekaligus menjadi destinasi wisata sejarah wisatawan pavorit domestik maupun mancanegara.

Pengunjung yang datang akan disajikan informasi sejarah perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Indonesia dalam Perjanjian Linggarjati.

Proses perjanjian tersebut direpresentasikan dalam bentuk diorama Sutan Syahrir beserta perwakilan lain dari pihak Indonesia dan para perwakilan dari Belanda.

Staf Pengelola Museum Linggarjati, Udi, mengatakan bangunan museum yang berdiri di lahan seluas 2,4 hektar ini hampir selalu ramai dikunjungi saat libur sekolah atau saat tiba akhir pekan.

"Gak tentu [jumlah pengunjung], tapi biasanya kalau akhir pekan atau libur sekolah, itu selalu ramai," ungkap Udi.

Menurutnya, tidak hanya wisatawan domestik saja yang kerap datang untuk belajar sejarah di sana,

tapi juga wisatawan mancanegara.

Kebanyakan memang wisatawan asing yang datang untuk mempelajari bagaimana sejarah Perjanjian Linggarjati antara Pemerintah Belanda dan Indonesia pada 1946 lalu ini.

"Banyaknya datang dari Belanda, China juga, bule itu sering datang ke sini," ungkap dia.

Selain bisa menikmati setiap informasi sejarah di setiap ruangan museum tersebut, pengunjung juga bisa berwisata alam di kawasan tersebut lantaran letaknya tepat di kaki Gunung Ciremai.

Pertama, kita bisa mengunjungi Ghiffari Valley untuk merasakan sensasi terapi ikan secara gratis. Lokasinya sendiri tidak terlalu jauh, bahkan kita bisa saja berjalan kaki menyusuri jalanan menurun dari museum ke Ghiffari Valley.

Kemudian, jika ingin menikmati wisata air, pengunjung juga bisa ke Linggarjati Water Park yang lokasinya tak jauh dari museum tadi.

Lalu, jika Anda menggunakan kendaraan sendiri, bisa juga bergeser ke kecamatan lain untuk menikmati wisata menarik, seperti Talaga Biru, Cibulan, Cibuntu, Sideland, hingga

menikmati destinasi lain yang banyak di Kabupaten Kuningan.

Mengutip museumindonesia Linggarjati di selatan Cirebon, adalah kota kecil di kaki Gunung Ciremai.

Sebuah rumah di sini pernah menjadi tempat berlangsung perundingan yang menghasilkan Perjanjian Linggarjati antara Indonesia-Belanda (11-12 November 1946). Sekarang dikenal sebagai Gedung Perundingan Linggarjati.

Gedung atau Museum Linggarjati sebutannya adalah salah satu saksi sejarah tentang Indonesia yang mencintai kemerdekaan, dan melalui sosok Bung Sjahrir serta kegigihan diplomasinya juga adalah Indonesia yang mencintai damai.

Ruang Perundingan Linggarjati meski dengan perabot replika toh cukup membantu pengunjung mendapatkan gambaran suasana ketika itu. Deretan kursi di sebelah kiri ditempati delegasi pihak Indonesia, dipimpin Sutan Sjahrir perdana menteri pertama Indonesia.

Pihak Belanda

menempati deretan kursi di sebelah kanan. Bertindak sebagai mediator adalah diplomat Inggris Lord Killearn, utusan khusus Inggris untuk Asia Tenggara, ber-kedudukan di Singapura.

Selama perundingan berlangsung, Lord Killearn dan beberapa delegasi Belanda seperti Schermerhorn, Ivo Samkalden, P. Sanders menginap di Linggarjati.

Kamar-kamar yang ditempati tokoh-tokoh perundingan dilabeli dengan baik di museum. Letnan Gubernur Jenderal van Mook dan anggota delegasi lainnya lagi menginap di Kapal Perang Banckert. (berbagai sumber)



Diduga Ada Jejak (dari hal 1)

GEDUNG Grha Wismilak di Jalan Raya Darmo 36-38, Surabaya, resmi disegel dan disita oleh penyidik Polda Jawa Timur, Senin (14/8/2023) sore. Padahal, karyawan dan manajemen serta beberapa mobil masih berada di dalam gedung.

Tampak para petugas Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, memasang police line di sekeliling gedung itu. Mereka juga memasang banner dan plang soal penyitaan di beberapa titik. Selain itu terdapat pula papan plakat berbahan besi bertuliskan sebuah informasi mengenai dugaan kasus korupsi yang membuat adanya proses penggeledahan tersebut. Papan itu dipasang di salah satu sudut halaman gedung.

"Berdasarkan Surat Penetapan Ijin Khusus Penyitaan Nomor 62/PenPid. Sus-TPK-SITA/2023/PN Sby, Tanah dan Bangunan, 1) SHGB Nomor 648. 2) SHGB Nomor 649, telah disita dalam perkara dugaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 subsider Pasal 264 lebih subsider Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dan atau Pasal 1 ayat (1) huruf a, b dan d Jo Ayat (2) UU RI No 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 dan Pasal 32 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan atau Pasal 13 Pasal 4 dan Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana," demikian tulisan di atas papan tersebut.

"Penyidik memasang plang atau banner penyitaan atas obyek tanah dan bangunan di Jalan Darmo 36-38, Surabaya," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, kepada awakmedia, Senin (14/8/2023).

Dirmanto mengatakan penyitaan itu berdasarkan surat penetapan izin khusus penyitaan Nomor: 62/PenPid. Sus-TPK-SITA/2023/PN Sby. "Adapun yang menjadi dasar daripada upaya penggeledahan dan penyitaan ini adalah telah ditemukan dan telah ada laporan terkait dugaan pemalsuan akta otentik. Jadi ada pemalsuan akta otentik penguasaan tanah dan bangunan yang dulunya Eks [Kantor] Polisi Istimewa menjadi gedung Wismilak," ucapnya.

"Penggeledahan juga terkait pelaksanaan okupasi gedung di Jalan raya Darmo 36 sampai 38. Itu asetnya karena itu dulu aset Polri. Dulu Polres Surabaya Selatan. Proses okupasinya tidak benar sehingga aset itu hilang," imbuh Farman.

Kemudian, kata Dirmanto, penyidik sampai sekarang juga masih melakukan pendalaman terhadap tiga objek atau tiga perusahaan terkait gedung itu. "Yaitu perusahaan PT Gelora Djaja, PT Bumi Inti Makmur, PT Wismilak Inti Makmur," ucapnya.

Namun Dirmanto belum mau membeberkan detail perkara itu, termasuk apakah ada saksi yang diperiksa hingga tersangka yang ditetapkan. "Ya nanti, selengkapnya terkait hal itu nanti. Secara garis besarnya semuanya nanti akan kami sampaikan setelah penyidik sudah betul-betul menyelesaikan proses penyidikan ini," ujarnya.

Aparat Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur juga mengaku sedang mendalami keterlibatan pejabat pemerintahan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang Gedung Grha Wismilak Surabaya.

"Keterlibatan pejabat pemerintah masih didalami semuanya, siapa terlibat dan bagaimana orang-orang terlibat," kata Dirmanto.

Ada tiga objek penggeledahan yakni Perusahaan Gelora Jaya, Bumi Inti Makmur dan PT. Wismilak Inti Makmur. Selain itu, aparat memasang police line dan plang penyitaan atas objek tanah dan bangunan yang berada di Jalan Darmo Nomor 36-38 Surabaya itu.

"Informasi kami terima dari penyidik, langsung disita karena ada izin pengadilan. Soal bagaimana proses pindah tangan dari Makopolres Surabaya Selatan jadi Wismilak akan disampaikan lebih lanjut," ujarnya.

Manajemen: Sah Dibeli Sejak 1993

Sementara itu, Manajemen PT Wismilak Inti Makmur Tbk mengatakan gedung itu telah dibeli oleh PT Gelora Djaja (Wismilak Group) sejak 1993, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. "Gedung Grha Wismilak telah dibeli oleh PT Gelora Djaja pada tahun 1993 secara sah dengan status bersertifikat Hak Guna Bangunan, sesuai mekanisme hukum dan perundang-undangan yang berlaku," kata Public Relations PT Wismilak Inti Makmur Tbk Anastesya Ftaraya melalui keterangannya, Senin (14/8/2023).

Gedung itu, kata dia juga telah digunakan sebagai kantor operasional perusahaan sejak tahun 1993 hingga saat ini. Tak pernah pula ada permasalahan hukum yang menyangkutnya. "Selama periode waktu tersebut tidak ada permasalahan hukum yang terjadi," ujarnya.

Terlepas dari penyitaan ini, diketahui gedung itu saat ini dimiliki oleh PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Wismilak sendiri merupakan perusahaan rokok yang cukup dikenal asal Surabaya. Melansir dari situs resmi perusahaan, Senin (14/8/2023), perusahaan ini didirikan oleh Lie Koen Lie, Tjioe Ing Hien, Tjioe Ing Hwa, dan Oei Bian Hok pada 1962 lalu. Saat itu perusahaan ini masih bernama PT Gelora Djaja.

Barulah pada 2012, Wismilak sukses melakukan penawaran umum perdana saham Perseroan kepada masyarakat dan menjadi Perusahaan Publik, PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM).

Sementara itu berdasarkan laporan tahunan perusahaan, per 31 Desember 2022 terdapat 5 orang pemegang saham utama yang

memiliki 5% atau lebih saham Wismilak. Bila ditotal, jumlah kepemilikan Wismilak yang dipegang kelima orang ini mencapai 63,15%.

Kelima pemegang saham utama yang dimaksud adalah Indahtati Widjajadi (16,14%) yang menduduki posisi Komisaris Utama. Kemudian ada Ronald Walla (15,18%) selaku Direktur Utama perusahaan dan Stephen Walla (15,18%) selaku komisaris.

Kemudian ada juga Gaby Widjajadi (9,34%) yang tidak menduduki posisi apapun di perusahaan dan Sugito Winarko (7,3%) selaku direktur Wismilak. Sisanya sebesar 36,86% dipegang oleh publik alias masyarakat umum.

Di sisi lain, Freddy H. Istanto, dosen Universitas Ciputra sekaligus pemerhati sejarah, mengatakan bahwa diperkirakan gedung tersebut berdiri sejak 1920 silam. Bangunan bergaya kolonial itu masuk ke dalam bangunan cagar budaya.

Gedung Wismilak tercatat dengan SK Wali Kota 188.45/251/402.104/1996 Nomor Urut 32 pada 2008.

Freddy menyebutkan, pada era dulu, gedung dua lantai sangat langka. "Adanya selasar, itu arsitektur tropis," tutur Freddy H. Istanto.

Freddy mengungkapkan, Kawasan Darmo Boulevard adalah kawasan elite sejak 1920. Pada 1929, Coen Boulevard yang sekarang bernama Jalan Dr Soetomo 27 Surabaya dimiliki Paul Alexander Johannes Wilhelm Brandenburg Van Der Gronden. "Paul Alexander itu seorang makelar gula firma G.L SIRKS & Co," terang Freddy H. Istanto.

Kemudian, pada 1936 - 1942, Gedung Wismilak disewa Toko Yan. Grha Wismilak, lanjut Freddy, adalah Toko Yan. Toko tersebut merupakan cabang dari Toko Piet kemudian berubah menjadi Toko Metro di Jalan Tunjungan. Di depan Toko Yan, ada halte trem listrik.

"Tahun berganti, gedung berubah fungsi. Pada 1945-1993, gedung Grha Wismilak menjadi Kantor Polisi Mapolres Surabaya Selatan. Gedung tersebut memiliki nilai sejarah tersendiri bagi Polri," imbuh Freddy. (wid,rls,ant/dya)



Plakat pengumuman penyitaan aset Gedung Graha Wismilak Surabaya oleh Polda Jatim.

TENTANG GEDUNG GRAHA WISMILAK

- Berlokasi di Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur.
- Pemkot Surabaya telah menetapkan Gedung Graha Wismilak sebagai salah satu cagar budaya. Nomor penetapannya adalah No SK : 188.45/251/402.1.04/1996, yang diterbitkan pada tanggal 26 September 1996.
- Gedung Graha Wismilak dibangun selam periode tahun 1920-an dengan gaya arsitektur bangunannya memakai gaya arsitektur Belanda. Jumlah lantainya ada dua.
- Luas keseluruhan gedung ini adalah 999,89 meter persegi. Luas lantai pertama dan kedua berbeda. Lantai pertama seluas 495 meter persegi, sedangkan lantai kedua seluas 504,64 meter persegi.
- Setelah mengalami perombakan sejak Juli 2003, gedung lama masih dipertahankan dan hanya ditambahkan dengan gedung baru.
- Gedung ini menjadi milik PT. Wismilak Inti Makmur yang diresmikan pada tanggal 9 September 2009. Jumlah lantainya berlantai empat dengan tambahan lantai atap dan lantai atas. Lantai tambahan ini seluas 522,8 meter persegi dan seluas 137 meter persegi.
- Arsitek yang mengerjakan perombakan gedung ialah Endramukti Design Associates. Bagian depan gedung juga dibuatkan taman dan pelataran parkir seluas 837,41 meter persegi.



DPRD JATIM : DAMPAK EL NINO JANGAN SAMPAI PENGARUHI KETAHANAN PANGAN

SURABAYA – Fenomena El Nino telah membawa dampak cuaca panas termasuk di Jatim. Kondisi ini menyebabkan kekeringan yang melanda lahan pertanian dan bisa mengakibatkan penurunan jumlah produksi pangan yang bisa saja berdampak negative terhadap Jatim sebagai lumbung pangan.

Berdasarkan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), sudah ada 937,85 pertanian padi terdampak kekeringan. Menyebabkan 29 hektar di antaranya alami puso. Sawah terdampak kekeringan tersebar di delapan kabupaten. Paling luas berada di kabupaten Lamongan dengan 885,6 hektar area sawah alami kekeringan. Sementara dua daerah alami puso dan dua kabupaten lainnya dinyatakan telah pulih.

Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, meminta pada Pemprov Jatim dan pemerintah daerah untuk mencari solusi mengantisipasi dampak cuaca panas ini. Meski demikian dia mengakui jika kondisi panas tidak bisa dielakkan.

“Sementara akan lakukan supporting terhadap kebutuhan air minum mereka dan anggaran kita siapkan untuk mengatasinya. Jangan sampai kondisi ini berpengaruh pada produksi pangan di Lamongan,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Jatim Iwan Zunaih mengatakan bahwa fenomena El Nino ini diprediksi sampai akhir tahun ini ada bulan desember dan kemungkinan pada awal 2024 nanti dan puncak-puncaknya pada Agustus sampai Oktober. “Fenomena yang perlu jadi perhatian bersama-sama baik dari Pemkab, Kota, Provinsi dan juga perhatian pemerintah pusat khususnya kekhawatiran kita di kabupaten Lamongan,” tandasnya, Senin (14/8/2023).

Dia juga mengatakan bahwa kabupaten Lamongan memiliki luasan lahan pertanian cukup luas dan merupakan salah satu lumbung padi dan penopang dari pada kebutuhan maupun kemandirian pangan khususnya Jatim. Di nasional, lanjutnya, Lamongan memiliki nilai strategis. Maka, di dalam pertanian ini perlu adanya satu perhatian secara bersama sama, karena sekali Lamongan lagi goyah dari hasil pertaniannya pasti akan menggoyahkan hasil pertanian di Jatim.

“Provinsi Jatim goyah itu akan berpangrush pada hasil pertanian nasional, di sini Lamongan ini perlu



adanya upaya antisipasi dan program mitigasi yang begitu kuat dan kompleks. Menurutku artinya kompleks disini ada urun rembuk, turun tangan secara bersama-sama kabupaten Lamongan sendiri dengan provinsi kemudian degan pihak pusat,” tandasnya.

Dia juga menandakan bahwa El Nino diprediksi akan cukup parah artinya akan terjadi sebuah fenomena alam yang akan memperengaruhi cuaca secara global panas luar biasa, air kurang, dan lain lain. Sehingga nanti diprediksikan ada bebraa resiko yang aka terjadi, kita harus antisipasi karena dengan elnino ini ada beberapa potensi resiko kebakaran, resiko gagal panen resiko kekurangan air pada manusia dan ternaknya.

“Sebelum ini semuanya terjadi kita harus melakukan beberapa mitigasi program antara lain dengan memetakan sumber mata air yang perlu diperbaiki ya. Yang diperhatikan, saluran air embung waduk dan lainnya agar itu bisa dimanfaatkan untuk air dan tandaon air,” katanya.

Anggota Komisi B, Daniel Rohi, juga mengatakan bahwa pemerintah harus berbuat sesuatu untuk membantu petani supaya mereka bisa tertolong dalam kondisi seperti ini. Sebab kondisi ini sebagai kejadian tak terduga. Kalau seperti itu, ya Pemerintah perlu memberi bantuan-bantuan yang perlu memberikan bantuan kepada mereka supaya lebih ceria gagal panen nya disubsidi.

Selain itu dia juga menegaskan bahwa pemerintah punya dana tak terduga yang dipakai untuk menangani dampak gelombang panas

tersebut. “Kita harus berbuat sesuatu untuk rakyat agar mereka tidak terputus bantuan apa kalau memang memungkinkan potensi sumur serapan bisa jadi buat sumur kalau tidak ya mereka diberikan bantuan subsidi tertentu dapat dipanen tapi kalau gagal,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim Dydik Rudy mengatakan sawah terdampak kekeringan tersebar di delapan kabupaten. Paling luas berada di kabupaten Lamongan dengan 885,6 hektar area sawah alami kekeringan. Sementara dua daerah alami puso dan dua kabupaten lainnya dinyatakan telah pulih. “Semua dampak kekeringan telah kami catat. Banyak pula yang sudah teratasi,” katanya.

DPKP saat ini juga telah membagi peta wilayah yang berpotensi kekeringan dan cara mengatasinya. Ada tiga wilayah merah yang berpotensi mengalami kekeringan tinggi di Jatim. Di antaranya, Lamongan, Bojonegoro, dan sebagian Trenggalek. Sementara delapan daerah berstatus kuning. Peta ini berdasarkan dampak kekeringan yang disebabkan oleh El Nino.

DPKP telah merankan agar zona merah untuk mengganti jenis tanam saat ini di masa kemarau. Yakni dari padi menjadi palawija. Sementara daerah kuning, diintervensi dengan bibit padi yang cukup tahan akan kondisi minim air. “Semuanya sudah dilakukan dan di intervensi,” paparnya.

Saat ini sebenarnya hampir seluruh petani di Jatim sudah

memasuki masa panen. Dan di musim seperti sekarang, mereka mulai beralih menanam palawija yang lebih tahan paceklik air. Namun petani di beberapa wilayah memang masih tampak menanam padi. “Kami memang tidak bisa memaksa. Hanya mengihimbau,” katanya. (lut/dya/adv)



Sementara akan lakukan supporting terhadap kebutuhan air minum mereka dan anggaran kita siapkan untuk mengatasinya.

Jangan sampai kondisi ini berpengaruh pada produksi pangan di Lamongan,”

KUSNADI
Ketua DPRD Jatim

